



**ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh

Naela Alfi Sahra

NIM 120810301014

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2016



**ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Naela Alfi Sahra

NIM 120810301014

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Orang tuaku tercinta, Ibu Dian Suhartini dan Bapak Totok Suroto yang tercinta terima kasih atas kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa yang senantiasa membuatku bersemangat untuk maju dan sukses;
3. Dosen Pembimbingku: Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM ,Ak, dan Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak yang telah membimbingku dengan kesabaran
4. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

MOTTO

“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new”

(Albert Einstein)

“Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan”

(Yasa Singgih)

“Hadapilah kesulitan dengan baik, karena dibalik itu semua akan ada kemudahan”

(Penulis)

PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Naela Alfi Sahara

NIM : 120810301014

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang berjudul “ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Mei 2016

Yang menyatakan,

Naela Alfi Sahara

NIM: 120810301014

SKRIPSI

**ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh :

Naela Alfi Sahra

NIM : 120810301014

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Miqdad, S.E,MM,Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SITUBONDO

Nama Mahasiswa : NAELA ALFI SAHRA
N I M : 120810301014
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 12 Mei 2016

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E,MM,Ak
NIP. 197107271995121001

Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak
NIP. 195502271984031001

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.
NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Naela Alfi Sahra

NIM : 120810301014

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

6 Juni 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si, Ak (.....)
NIP 196001031991031001

Sekretaris : Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak (.....)
NIP 197204162001121001

Anggota : Novi Wulandari, SE, M.Acc & Fin, Ak (.....)
NIP 198011272005012003

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 00

Naela Alfi Sahra

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD tahun anggaran 2010 hingga tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan Rasio Kemandirian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo masuk dalam kategori instruktif, Rasio Efektivitas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo terbilang efektif, Rasio Efisiensi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo kurang efisien, Rasio keserasian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh belanja rutin, *Debt Service Coverage Ratio* menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo Mampu untuk melakukan pinjaman, Rasio Pertumbuhan PAD menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo setiap tahun mengalami kenaikan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat masih sangat kurang.

Kata kunci: Analisis Rasio Keuangan APBD, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Naela Alfi Sahra

Accounting Departement, Economics and Bussiness Faculty, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to analyze the Government's Financial Performance Situbondo using Financial Ratio Analysis of the Regional Budget (APBD). This type of research used in this research is descriptive quantitative approach. The data used in this study are primary data in the form of budget Budget Realization Report fiscal year 2010 to 2014. The results showed self-reliance ratio indicates Situbondo regency government in the category instructive, showing Government Effectiveness Ratio Situbondo fairly effective, the Government Efficiency Ratio shows Situbondo less efficient, ratio harmony shows the Government Situbondo still dominated by routine expenditure Debt Service Coverage ratio indicates the Government Situbondo Being able to make loans, Growth ratio PAD indicates the Government Situbondo each year has increased, ratio degree of Fiscal Decentralization shows the Government Situbondo level of authority and the responsibilities given by the central government is still lacking.

Keywords : *Financial Ratio Analysis Budgets , Financial Performance Government District.*

RINGKASAN

Analisis Rasio Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo; Naela Alfi Sahra 120810301014; 2016; halaman 77; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pada era berakhirnya Orde baru tahun 1998 menyebabkan banyak perubahan dalam pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di Pemerintah Pusat tetapi juga terjadi pada Pemerintah Daerah. Setelah era reformasi sistem Pemerintahan Indonesia awalnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan menjadi harapan baru bagi Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, , sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Oprasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau yang dikaji secara kuantitatif. Menurut Nazir (2005) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian menunjukkan Rasio Kemandirian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo masuk dalam kategori instruktif, Rasio Efektivitas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo terbilang efektif, Rasio Efisiensi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo kurang efisien, Rasio keserasian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh belanja rutin, *Debt Service Coverage Ratio* menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo Mampu untuk melakukan pinjaman, Rasio Pertumbuhan PAD menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo setiap tahun mengalami kenaikan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat masih sangat kurang.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,
2. Dr. Mochammad Fathorrazi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
3. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
4. Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi Mahasiswa,
5. Dr. Muhammad Miqdad, S.E,MM,Ak selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
7. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Dian Suhartini dan Bapak Totok Suroto yang penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa dalam penyusunan skripsi ini,

8. Kakakku Yanuar Rizki, dan Adikku Mohammad Riyadi terima kasih atas bimbingan, inspirasi, dorongan, bantuan serta nasihat-nasihatnya selama ini,
9. Sahabat-sahabatku serta teman-temanku di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Octarisa D.C., Hudalila Safitri, Ponti Primastuti, Deandra Puspitasari, Melly Sugiarto, Linda Trisna, Aulia R., Luluk Maknunah, Dwi Rahayu, terima kasih atas bimbingan, semangat, dukungan dan solidaritas mulai dari awal kuliah sampai sekarang, semoga kita semua menjadi orang yang sukses,
10. Teman-teman Kos, Iftakhul Jannah, Siti Asiyah Ulfa, Mumpuni Mulki Rani, Leila Faranazt, Mbak Astri, terima kasih atas semangat dan dukungannya,
11. Guru-guruku dari TK, SD, SMP dan SLTA yang sudah mengajarku selama ini
12. Teman-teman serta saudara, Gita Andini, Bella Ayunita, Clara Sinta, Mbak Wulan, terima kasih atas semangat dan canda tawanya,
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 17 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GRAFIK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Otonomi Daerah	9
2.2 Keuangan Daerah.....	10
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12

2.3.1	Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	14
2.3.2	Sruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	16
2.3.3	Prinsip Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja.....	18
2.4	Laporan Keuangan Daerah.....	19
2.5	Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	21
2.5.1	Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	21
2.5.2	Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	23
2.6	Analisis Rasio Keuangan pada APBD.....	24
2.7	Penelitian Terdahulu	26
BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Populasi dan Sampel	32
3.3	Sumber Data	32
3.4	Objek Penelitian	33
3.5	Metode Pengumpulan Data	33
3.6	Metode Analisis Data	34
2.3.4	Analisis Rasio Keuangan Pada APBD	34
3.6.2	Analisis Trend	39
3.7	Kerangka Pemecahan Masalah	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo.....	42
2.3.5 Letak Geografis	43
2.3.6 Topografi.....	43
2.3.7 Penduduk.....	44
2.3.8 Ketenagakerjaan	45
4.2 Hasil Analisis Data	45
4.2.1 Analisis Rasio Keuangan Pada APBD	45
4.2.2 Analisis Trend	55
4.3 Pembahasan	61
4.3.1 Hasil Analisis Rasio Laporan Keuangan terhadap APBD	61
BAB V KESIMPULAN	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Keterbatasan.....	76
5.3 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Peta Wilayah Kabupaten Situbondo	43



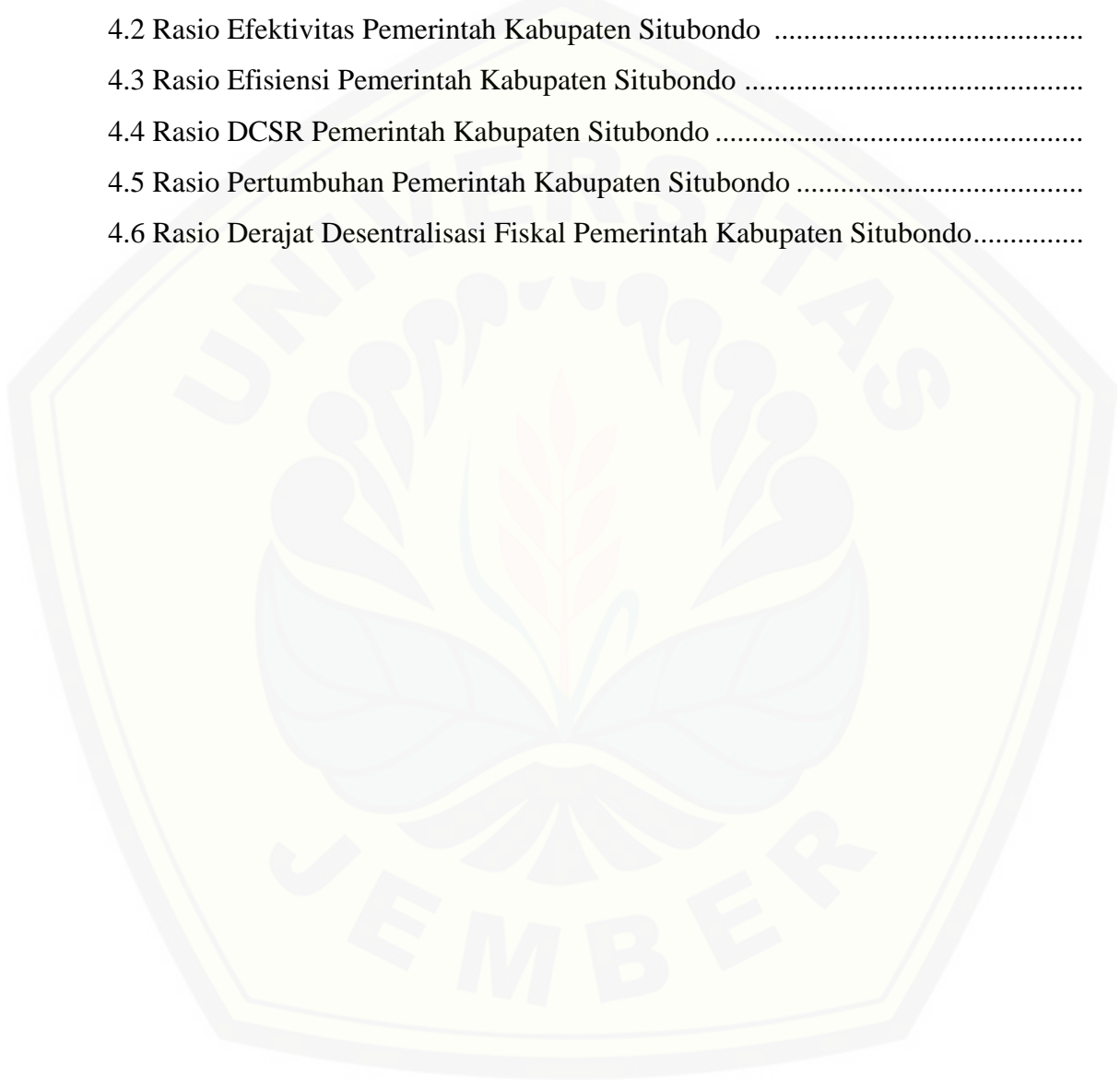
DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	29
3.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	35
3.2 Efektifitas Keuangan Daerah	36
3.3 Efisiensi Keuangan Daerah	37
3.4 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	39
4.1 Perhitungan Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Situbondo	46
4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Situbondo.....	47
4.3 Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Situbondo	48
4.4 Perhitungan Rasio Keserasian Berdasarkan Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Situbondo.....	49
4.5 Perhitungan Rasio Keserasian Berdasarkan Belanja Rutin Pemerintah Kabupaten Situbondo.....	50
4.6 Perhitungan Rasio DCSR Pemerintah Kabupaten Situbondo.....	51
4.7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo	53
4.8 Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Situbondo	54
4.9 Formulasi Analisis Trend Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Situbondo	55
4.10 Hasil Analisis Trend Tingkat Kemandirian Anggaran Daerah Kabupaten Situbondo	55
4.11 Formulasi Analisis Trend Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Situbondo	56
4.12 Hasil Analisis Trend Tigkat Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Situbondo	56
4.13 Formulasi Analisis Trend Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Situbondo...	56
4.14 Hasil Analisis Trend Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Situbondo	57
4.15 Analisis Trend Rasio Keserasian Belanja Rutin/Operasional Pemerintah Kabupaten Situbondo.....	57

4.16 Hasil Analisis Trend Tingkat Keserasian Belanja Rutin/ Operasional Anggaran Daerah Kabupaten Situbondo	57
4.17 Formula Analisis Trend Rasio Keserasian Belanja Modal/Investasi Pemerintah Kabupaten Situbondo.....	58
4.18 Hasil Analisis Tingkat Keserasian Belanja Modal/Investasi Anggaran Kabupaten Situbondo.....	58
4.19 Formula Analisis Trend Rasio DCSR Pemerintah Kabupaten Situbondo	59
4.20 Hasil Analisis Tingkat DCSR Anggaran Daerah Kabupaten Situbondo	59
4.21 Hasil Analisis Rasio Tingkat Pertumbuhan Anggaran Daerah Kabupaten Situbondo	60
4.22 Formula Analisis Trend Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Situbondo	60
4.23 Hasil Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal Anggaran Daerah Kabupaten Situbondo	61

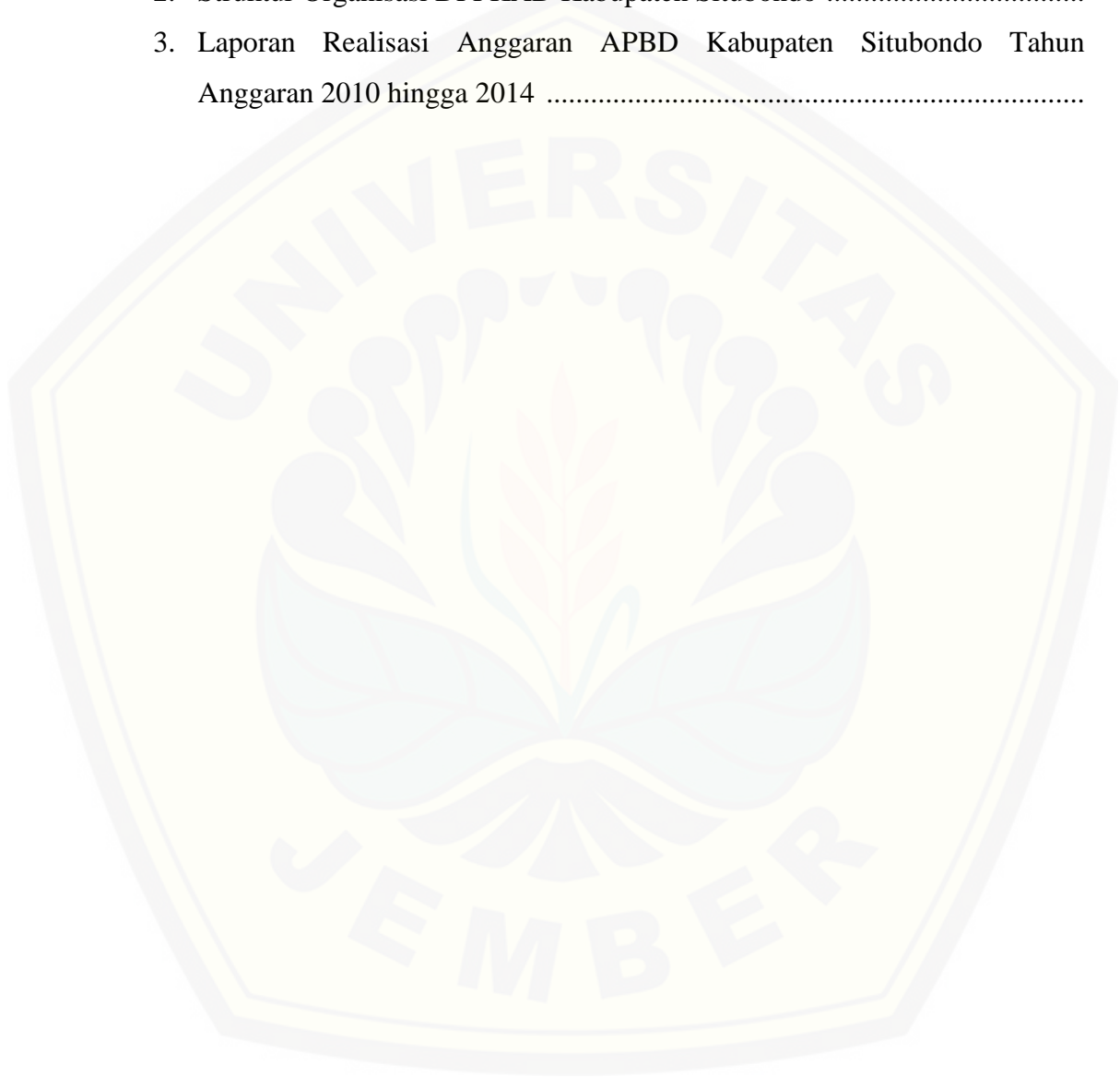
DAFTAR GRAFIK

	Halaman
4.1 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Situbondo.....	46
4.2 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Situbondo	47
4.3 Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Situbondo	48
4.4 Rasio DCSR Pemerintah Kabupaten Situbondo	52
4.5 Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo	53
4.6 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Situbondo.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
1. Hasil Wawancara	1
2. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Situbondo	2
3. Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 hingga 2014	3



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era berakhirnya Orde baru tahun 1998 menyebabkan banyak perubahan dalam pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di Pemerintah Pusat tetapi juga terjadi pada Pemerintah Daerah. Setelah era reformasi sistem Pemerintahan Indonesia awalnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan menjadi harapan baru bagi Indonesia. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Otonomi daerah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Daerah-daerah otonom (kabupaten/kota) diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan

terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Oprasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antar generasi
5. Evaluasi kinerja

Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pada Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

APBD merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. Dampaknya terhadap pembangunan pasti berbeda-beda. Pembangunan infrastruktur jalan akan mendorong perkembangan kegiatan sektor-sektor yang menggunakan jalan tersebut (sektor perdagangan, pertanian, industri, transportasi dan lainnya) serta berpengaruh pula terhadap perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang selanjutnya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis kegiatan dan proyek yang akan dibangun harus mengacu pada Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstrada). Terdapat hubungan benang merah mulai dari sumber pembiayaan penerimaan daerah, penyusunan APBD, alokasi anggaran sampai pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. (Adisasmita, 2011:3)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu system yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran Kinerja pada dasarnya merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat

memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan public, yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*).

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Menurut Muljarjadi (2006:77) dalam indriyani (2015) beberapa manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya pengukuran kinerja, diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas organisasi publik kepada DPRD dan publik lebih mudah dilihat.
2. Lebih memotivasi peningkatan pelayanan kepada publik.
3. Peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah.
4. Anggaran kinerja menekankan pada sasaran kinerja dan pencapaian bukan pada pembelian yang dilakukan organisasi.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam (Abdul Halim, 2007:230) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Astriana (2014) pada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 2008 hingga tahun 2012 memiliki hasil untuk Rasio Kemandirian yaitu instruktif, mengartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang kemampuan keuangan untuk memenuhi tugas-tugas pemerintah daerah masih rendah, hal tersebut berimbas pada hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal yang juga rendah, yang mengartikan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kota Magelang.

Pramono (2014) meneliti kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Surakarta untuk hasil Rasio Keserasian membandingkan belanja operasional/belanja rutin dengan belanja modal, Pemkot Surakarta dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011). Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih rendah yaitu sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Hal ini mengartikan bahwa persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Pratama (2013) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang diukur dari data APBD sudah sangat baik dan mampu melakukan otonomi daerah secara menyeluruh dari laporan APBD, penilaian tersebut dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas & efisiensi, aktivitas, dan kemampuan keuangan daerah. Namun jika dilihat dari

pertumbuhannya, terjadi fluktuasi pertumbuhan kinerja keuangan yang bersumber dari laporan APBD dan cenderung terjadi penurunan pada tahun 2012.

Pada penelitian ini membahas tentang kinerja keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo. Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya tampak aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda.

Namun Kabupaten Situbondo, ternyata masih belum terbebas sebagai penyandang status daerah miskin. Pada dasarnya, Kabupaten Situbondo memiliki potensi yang luar biasa pada sektor pertanian dan sektor kelautan. Mayoritas penduduk di Kabupaten Situbondo pun bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Disini diperlukan peran pemerintah dalam membuat strategi untuk mengentaskan Kabupaten Situbondo dari status miskin dengan melakukan pembangunan manusia, pendidikan, kesejahteraan, rehabilitas dan jangan sampai terisolir dari lingkungan di daerahnya.

Analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dilakukan berdasarkan laporan keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan tahun anggaran 2010 hingga 2014. Pada tahun 2010 hingga 2011 terdapat pos belanja daerah yang menyerap Belanja Tidak Langsung atau Belanja pegawai sebesar 70,7 % dan 64,1 %, lebih besar jika dibandingkan dengan Belanja Modalnya. Hal ini dapat diartikan bahwa belanja daerah masih didominasi oleh belanja tidak langsung, secara sederhana belanja tidak langsung biasanya dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Idealnya proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Selain dapat memenuhi rasa keadilan publik, secara teoritis memang alokasi anggaran yang lebih besar di belanja langsung dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan pada tahun 2012 hingga 2014

Pendapatan daerah Kabupaten Situbondo didominasi oleh dana perimbangan sebesar Rp. 731.329.065,308 atau 78,69 % pada tahun 2012; Rp.798.617.081.737,58 atau 79,24% pada tahun 2013 dan 1.305.647.017.406,14 atau 74,96 % pada tahun 2014. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya menjadi penyuplai APBD yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah tidak mengalami peningkatan yang cukup positif. PAD merupakan jenis pendapatan daerah yang secara langsung dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu ditetapkan rumusan tentang kebijakan-kebijakan apa yang akan ditempuh sehingga PAD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pendanaannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public*) serta melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Sehingga dengan adanya penjabaran permasalahan daerah tersebut maka peneliti ingin menganalisis kinerja pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran APBD selama lima tahun. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan judul :

“Analisis Rasio Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan analisis rasio laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja

Keuangan Pemerintah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan analisis rasio laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi, akademisi dan peneliti yaitu :

1. Bagi akademisi

Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat menjadi gambaran dan evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pengukuran kinerja pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini membantu masyarakat dalam memahami bagaimana pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo

4. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta mengetahui dalam mengukur dan menganalisa kinerja Pemerintah Daerah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan Indonesia pada era reformasi yang pada awalnya menggunakan sistem sentralisasi saat ini mengalami perubahan menjadi desentralisasi. Hendry Maddick (1963) menjelaskan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara umum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983) mengemukakan, desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan, baik keuangan maupun hukum, pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada diluar kontrol langsung pemerintah pusat (Bheyamin Hoessein, 200:10). Sedangkan Rondinelli (1983:18) merumuskan :

Decentralization is the transfer of planning, decision, making, or administrative authority from the central government to its organization, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organization, local government, or nongovernment organization. (Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah) (Nurcholis, 2005; 10-11).

Perubahan sistem pemerintahan tersebut tertuang dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) dan (6) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk membantu dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Salah satu urusan yang diserahkan pada daerah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru

bagi daerah bersangkutan karena PAD sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah (Florida, 2006).

Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain: (1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. (2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Wenny, 2012).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang (Widjaja, 2011:76-77).

2.2 Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai, “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain

sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku” (Mamesah,1995 dalam Halim, 2007). Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu :

1. Semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan pemerintah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.
2. Semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

Hal-hal yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah BUMD. Di samping itu, pengurusan akuntansi keuangan daerah juga dibagi menjadi dua, yaitu pengurusan umum dan khusus (berkaitan dengan kewajiban perbendaharaan), seperti halnya pada keuangan negara. Pengurusan umum juga dibagi menjadi dua, yaitu otorisator dan ordonator. Menurut UU nomor 5 Tahun 1974, wewenang otorisator, ordonator, dan bendaharawan dipegang oleh kepala daerah (gubernur, walikota, dan bupati). Namun, dalam pelaksanaannya, wewenang tersebut dilimpahkan kepada Sekwilda, kepala biro keuangan dan kepala bagian perbendaharaan, serta Bank Pembangunan Daerah dan pegawai sipil.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi, manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut”. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah (Halim, 2007).

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemandirian pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Dalam kepentingan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Mamesah, 1995). Bentuk dari APBD sekarang didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah keuangan daerah tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Dari kedua definisi tersebut, menunjukkan bahwa APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara terperinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun

Untuk penyusunan APBD merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya penyusunan APBD ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan adalah sebagai alasan :

1. APBD merupakan program kerja dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang akan ditempuh dalam satu tahun anggaran
2. Dalam APBD ditentukan estimasi jumlah pajak yang dibebankan pada masyarakat di daerah yang bersangkutan
3. APBD merupakan sarana untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bersangkutan
4. APBD memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah umumnya dan Kepala Daerah Khususnya
5. APBD merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah
6. APBD merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batas tertentu.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tergambar semua hak dan kewajiban daerah dan rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. (Sonny Sumarsono, 2010 dalam Indriyani, 2015) Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.3.1 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD, yaitu (Nordiawan, dkk 2007: 43-47) :

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD. Proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun berdasarkan RKPD yang ditetapkan Mendagri melalui Surat Edaran. Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan rancangan awal KUA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana program kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi dan strategi Pemda. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menentukan skala prioritas urusan yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemda. Dalam menentukan skala prioritas ini,

TAPD dapat menggunakan teknik-teknik *review and ranking* yang ada, baik yang berbasis statistik maupun tidak.

3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. Setidaknya tiga dokumen dalam lampiran Surat Edaran Kepala Daerah yang dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RKA-nya, yaitu :
 - a. Dokumen KUA, yang memberikan rincian program dan kegiatan per SKPD.
 - b. Standar Satuan Harga, yang menjadi referensi dalam penentuan rincian anggaran di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
 - c. Kode Rekening untuk tahun anggaran bersangkutan.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan berpedoman Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.
5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD. Dokumen sumber yang utama dalam penyiapan Raperda APBD adalah RKA SKPD. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai pedoman dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Proses selanjutnya adalah pengkompilasi seluruh RKA yang telah dievaluasi TAPD menjadi dokumentasi kompilasi yang dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (APBD). Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur untuk dievaluasi. Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 15 hari kerja sejak penyerahan dilakukan. Jika kedua

rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi maka Pemda bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan.

2.3.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas; Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri atas; Bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Pinjaman Daerah

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 membolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri atau bersumber dari luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggrannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat

dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah.

Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman daerah.

d. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Lain-lain penerimaan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan/ atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi (Adisasmita, 2011 4:9)

2. Belanja Daerah

Pemerintah daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

a. Belanja tidak langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas ; Belanja Pegawai, Belanja Bunga, subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

b. Belanja langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas ; Belanja Pegawai (Honorarium/Upah), Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal

3. Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 1 ayat 54, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari :

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup ; Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah
- b. Pengeluaran pembiayaan mencakup; Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman daerah.

2.3.3 Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja

Berdasarkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2005) dalam Indriyani, 2015 prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
2. Disiplin Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum tersedia anggarannya

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/ perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3. Keadilan Anggaran Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa didiskriminasi dalam pemberian layanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Nordawan,2007: 151). Laporan keuangan ini diperlukan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan

masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahaan pada akhir periode atau pada akhir tahun buku. Laporan keuangan dapat dibuat secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Namun untuk kepentingan pihak eksternal laporan keuangan dibuat secara tahunan.

Laporan keuangan tahunan meliputi : Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan laba ditahan dan Laporan Arus Kas. Dalam laporan keuangan terdapat dua macam informasi penting yang diperoleh para pemegang saham, yaitu bagian dari uraian, yang berupa kata pengantar dari pucuk pimpinan, perusahaan, yang menggambarkan hasil usaha kegiatan perusahaan selama satu periode (satu tahun) yang lalu serta membahas perkembangan-perkembangan baru yang terjadi yang akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermantaaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tujuan umum laporan keuangan, adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sementara, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, aru kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan megevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, aset dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-

undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari :

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya.

2.5 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Pengertian dari Kinerja menurut Bastian (2001:329) dalam Nogi (2005:175) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutama dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kinerja juga dapat dikatakan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan “sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial”. Adapun Indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD.
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan

Sedangkan untuk pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Sumarjo, 2010 dalam Adhiantoko, 2013) adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. dalam kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat menggambarkan kemampuan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya agar tidak tergantung dengan pemerintah pusat dan memiliki kesempatan untuk keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi sektor publik khususnya pemerintah merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik. Oleh karena itu pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial maupun nonfinancial dan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah ketika administrasi dan penyediaan jasa telah dicapai pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986: 99 dalam Adhiantoko, 2013).

1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Whitaker, (1995:250) dalam Wenny (2012) mendefinisikan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sejalan dengan itu Robert Simons (1995) menyatakan sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil /output aktual dengan sasaran dan tujuan strategi. Dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (Nogi, 2003:108).

Secara umum, tujuan penilaian kinerja adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Ulum, 2004:277).

Pada dasarnya penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004:121) dalam Pramono, 2012.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Abdul Halim 2007:230):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.6 Analisis Rasio Keuangan pada APBD

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode

dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi. (Halim, 2007 : 230-232).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam (Abdul Halim, 2007:230) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan di beberapa daerah/kabupaten, diantaranya; Joko Pramono (2012) meneliti Kinerja Keuangan pada pemerintah Kota Surakarta pada tahun anggaran 2010 hingga tahun 2011 menggunakan Rasio Kemandirian daerah, Rasio efektivitas, Rasio keserasian, Rasio efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Rasio DSCR. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011). Pemkot Surakarta sangat efisien di dalam mengelola PAD nya, hal ini bisa di lihat dari hasil perhtingan rasio efisiensi sebesar 27,95% (2010) dan 14,15% (2011) dan Efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola PAD nya mengalami peningkatan dari efektif menjadi sangat efektif, yakni dari 94,81% (2010) meningkat menjadi 102,79% (2011). Berdasarkan Rasio Keserasian Pemkot Surakarta dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011). Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih rendah yaitu sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang sudah baik adalah pada aspek efisiensi, efektivitas, pertumbuhan dan kemampuan membayar pinjaman. Jumlah pendapatan dan jumlah PAD mengalami pertumbuhan yang positif, untuk pendapatan naik sebesar 19,92%, sedangkan PAD mengalami kenaikan cukup tinggi yakni sebesar 58,93%. Di lain pihak belanja operasi naik sebesar 14,58% dan belanja modal naik sangat tinggi sebesar 61,03%.

Ayu Febriyanti (2013) meneliti Kinerja Keuangan pemerintah daerah kota Malang tahun anggaran 2007-2011, menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Belanja rutin dan Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja serta Rasio Pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota

Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah. Jadi secara keseluruhan ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kota Malang seperti kemandirian keuangan kota Malang yang masih rendah dan aktifitas pemerintah kota Malang dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Astria Nabila Muhibtari (2014) menganalisis Kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang pada tahun anggaran 2008 hingga tahun 2012. Menggunakan analisis Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Perhitungan *Share* dan *Growth*, Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Hasil dari perhitungan analisis Rasio kemandirian memiliki pola hubungan instruktif, mengartikan bahwa Kemandirian Pemerintah Kota Magelang berada pada kemampuan keuangan yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Hasil perhitungan Rasio Kemandirian tersebut berimbang pada hasil Rasio Desentralisasi Fiskal yang rendah mengartikan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kota Magelang. Sedangkan pengelolaan PAD berdasarkan hasil analisis Rasio Efektif dan Efisien Pemerintah Kota Magelang terbilang sangat efektif dan efisien. Namun pada analisis rasio keserasian Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung. Dilihat dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008

sampai dengan 2012, maka diperoleh data Share sebesar 10,918% dan Growth sebesar 604,530%, sehingga posisi Kota Magelang berada pada kuadran II yang berarti berada pada kondisi belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Magelang selama periode 5 tahun, skala indeks menunjukkan angka 0,528525 yang berarti kemampuan keuangan Kota Magelang tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang ditunjukkan pada analisis rasio kemandirian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya.

Adipta Nur Pratama (2013) menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menggunakan pengukuran Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas/Keserasian, Kemampuan Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan. Hasil dari perhitungan analisis tersebut Kinerja keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diukur dari data APBD sudah sangat baik dan mampu melakukan otonomi daerah secara menyeluruh dari laporan APBD, penilaian tersebut dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas & efisiensi, aktivitas, dan kemampuan keuangan daerah. Namun jika dilihat dari pertumbuhannya, terjadi fluktuasi pertumbuhan kinerja keuangan yang bersumber dari laporan APBD dan cenderung terjadi penurunan pada tahun 2012.

Hony Adhiantoko (2013) menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Blora Tahun anggaran 2007 hingga 2011. Menggunakan pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD serta Rasio Keserasian. Kinerja Keuangan Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 6,46%; 7,05%; 6,88%; 5,82%; dan 6,65%. jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 7,02%; 7,75%; 7,39%; 6,33%; dan 7,35%. jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan

Kabupaten Blora tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 99,39% dan 83,34%. Tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 135,43%; 110,63%; dan 114,76%. jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran 74,87%-93,27%, rata-rata sebesar 84,55%, Untuk belanja modal berada pada kisaran 6,69%-19,74%, rata-rata sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Blora masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Alat Pengukuran
Joko Pramono (2012)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2011 dan 2010	Rasio Kemandirian daerah, Rasio efektivitas, Rasio keserasian, Rasio efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Rasio DSCR.
Ayu Febriyanti (2013)	Analisis Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Malang	Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Malang selama lima tahun terakhir	Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian Rasio Pertumbuhan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Alat Pengukuran
Astria Nabila Muhibtari (2014)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012 dan	Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kesenjangan, Perhitungan <i>Share</i> dan <i>Growth</i> , Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)
Adipta Nur Pratama (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Menganalisis kinerja keuangan daerah dan anggaran Provinsi DKI Jakarta pada masa otonomi daerah, Menganalisis pengaruh otonomi daerah terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta dan Mengestimasi PAD Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang.	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas/Kesenjangan, Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Alat Pengukuran
Hony Adhiantoko (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011)	Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD dan Rasio Keserasian	Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD dan Rasio Keserasian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian untuk mempelajari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo selama tahun anggaran 2010 hingga tahun 2014 untuk menilai kinerja keuangan daerah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau yang dikaji secara kuantitatif. Menurut Nazir (2005) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol (Hamdi, 2014:5). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dilihat dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, *Debt Service Coverage Ratio*, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari berbagai periode tahun. Sehingga peneliti mengambil sampel yang digunakan untuk penelitian yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Situbondo pada tahun 2010 sampai tahun 2014.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 2009:146-147). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah Kabupaten Situbondo berupa Laporan Realisasi Anggaran pada periode tahun 2010 hingga 2014, sumber data tersebut didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo.

3.4 Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Daerah kabupaten Situbondo. Khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dokumenter

Data Dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam kejadian (Indriantoro, 2009: 146). Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang dipublikasikan berupa Laporan Realisasi Anggaran pada periode tahun 2010 hingga tahun 2014.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden (Indriantoro, 2009:152).

3.6 Metode Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan maka metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini antara lain :

1. Menghitung rasio laporan keuangan untuk mengukur kinerja berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel.
2. Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio laporan keuangan dari setiap periode.
3. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio laporan keuangan atau dengan melihat grafiknya.

3.6.1 Analisis Rasio Keuangan pada APBD

Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :

1. Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Perhitungan dengan menggunakan rasio keuangan ini sebagai berikut (Halim, 2008) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemeritnah Pusat/Provinsi Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 . Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 -75	Partisipasif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Sumber : Halim 2001 : 168 dalam Joko, 2012

Secara konseptual, pola hubungan antara pusat dan Pemerintah daerah harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan daerah ini menimbulkan perbedaan. Ada empat pola hubungan yang memperkenalkan “Hubungan Instusional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain (Halim, 2002 dalam Eshty, 2012) :

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk menghitungnya menggunakan rumus (Halim, 2008) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yg Ditetapkan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 . Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom Dan Kemampuan Keuangan	Rasio efektivitas (%)
Tidak efektif	X<100%
Efektif berimbang	X=100%
efektif	X>100%

Sumber : Moh. Mahsun, 2006 dalam Joko, 2012

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

Guna untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh pemda. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik. Untuk itu pemda perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Efisiensi keuangan tersebut dapat diketahui dalam perhitungan (Halim, 2008) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 . Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah Otonom Dan Kemampuan Keuangan	Rasio efisiensi (%)
Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90% -100%
Cukup efisien	80% -90%
efisien	60% -80%
Sangat efisien	>60%

Sumber : Kepmendagri no. 690.900.327 dalam Joko, 2012

3. Rasio Kesenjangan

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim, 2008) :

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. *Debt Service Coverage Ratio*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan PAD, pemda dapat menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. DCSR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta

Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan pinjaman lainnya yang jatuh tempo (Halim, 2008). DSCR minimal sebesar 2,5 % berdasarkan PP nomor 105 tahun 2000 pasal 19, merupakan ketentuan yang menyangkut persyaratan dalam menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman. Jika DSCR lebih dari atau sama dengan 2,5 berarti pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Sebaliknya, jika DSCR kurang dari 2,5 maka pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman lagi. Perhitungan DCSR sebagai berikut :

$$\text{DCSR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok Anggsuran} + \text{ Bunga} + \text{ Biaya Pinjaman)}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Untuk mengetahui pertumbuhan keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2008) :

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{\text{PAD t1} - \text{PAD t0}}{\text{PAD t0}} \times 100\%$$

Keterangan : PAD t1 = tahun yang dihitung

PAD t0 = tahun sebelumnya

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya, bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa

daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010) dalam Astriana, 2014 , derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam peyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.4 . Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap TPD (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2001:22) dalam Adhistia, 2012

3.6.2 Analisis Trend

Analisis trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu dan nilainya cukup rata (Dajan, 1984). Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi/data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relative cukup panjang, sehingga dari hasil analisis

tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut.

Secara teoritis, dalam analisis *time series* yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalan akan semakin jelek (Santoso, 2008) dalam Esthy (2012). Sehingga dapat diketahui kecenderungan kinerja pemerintah daerah apakah semakin meningkat atau menurun. Secara umum persamaan garis linier dari analisis *time series* adalah :

$$Y = a + bX$$

Nilai a (nilai konstanta) dapat diperoleh dari rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{N}$$

Dan untuk mencari b (nilai parameter) adalah :

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

Y : variabel yang dicari trendnya

a : konstanta (nilai trend periode dasar)

b : Slope atau lereng garis trend (pertambahan trend tahunan)

X : waktu

N : jumlah tahun yang akan diteliti

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan Rasio Kemandirian terhadap Pemerintah Kabupaten Situbondo selama tahun anggaran 2010 hingga tahun 2014 sebesar 8,1%, angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah masuk dalam kategori pola hubungan instruktif, hasil tersebut menunjukkan peran pemerintah pusat lebih mendominasi dalam melaksanakan otonomi daerahnya.
2. Hasil dari analisis Rasio Desentralisasi Fiskal selama lima tahun anggaran sebesar 7,16 % bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat masih sangat kurang.
3. Rasio Kemandirian dan Rasio Desentralisasi Fiskal mengacu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dasar perhitungan untuk menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo. Untuk mengetahui naik dan turunnya PAD di Kabupaten Situbondo dapat digambarkan dengan analisis Rasio Pertumbuhan, selama lima tahun anggaran dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami fluktuasi, puncaknya realisasi PAD tertinggi pada tahun 2014 sebesar 66,11 %, namun kenaikan PAD tersebut masih belum mampu menghantarkan Kabupaten Situbondo mandiri dalam kegiatan otonomi daerahnya dan peran Pemerintah Pusat masih mendominasi.
4. Dalam melakukan kegiatan otonomi daerah, selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah juga dapat membiayai kegiatan otonomi dengan cara melalui pinjaman. Dari hasil *Debt Coverage Service Ratio* Kabupaten Situbondo memiliki hasil rata-rata 22,09% hasil ini lebih dari batas dari pemerintah pusat sebesar 2,5% sehingga

Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembiayaan kegiatan pemerintahan dapat melalui pinjaman.

5. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situbondo selama tahun anggaran dari tahun 2010 hingga tahun 2014, jika dilihat tingkat keefektivannya, pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kinerja keuangan yang efektif, itu dibuktikan dengan hasil perhitungan Rasio Efektivitas sebesar 110,82 % yang masuk kategori efektif dalam merealisasikan target PAD yang sudah direncanakan. Namun, dalam perhitungan Rasio Efisiensi yang hasilnya sebesar 98,72% masuk kategori kurang efisien. Menandakan bahwa Kabupaten Situbondo masih belum mampu mengelola belanja daerah yang bertujuan untuk pembangunan daerah. Sehingga pengeluaran daerah lebih banyak dari pada pendapatan yang diterima.
6. Perhitungan Rasio Kesenjangan yang membandingkan antara belanja modal dan belanja rutin perbandingan tersebut 81,6% untuk belanja rutin sedangkan 18,3% untuk belanja modal, perbandingan tersebut masih jauh lebih besar belanja rutin. Sehingga belanja pembangunan yang dibutuhkan untuk daerah yang dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat belum terlaksana dengan baik.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan rasio keuangan yang diterapkan di pemerintah, namun, rasio ini belum menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Karena penelitian ini hanya dapat menilai kinerja pemerintah dari segi keuangan saja.
2. Penilaian kinerja pemerintah dalam penelitian ini hanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2010 hingga 2014, sehingga untuk menilai segi keuangan pemerintah daerah belum bisa dijadikan

pedoman atau dasar untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membutuhkan masih banyak informasi terkait dengan proses perencanaan anggaran hingga realisasi anggaran.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin meneliti kinerja keuangan daerah sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah komponen dokumen dan pengukuran yang akan dipakai.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif guna menjelaskan secara mendalam tentang kinerja keuangan daerah dengan pihak terkait dan dokumen pendukung.
3. Untuk peneliti selanjutnya, untuk penelitian tentang kinerja keuangan dapat dipadukan dengan penambahan variabel yang diteliti seperti sumber daya manusia atau segi ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arwati, Dini. Hadiati, Novita. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Skripsi. Universitas Widyatama Bandung.
- Dewi, Elita. 2002. *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmiah. Universitas Sumatera utara
- Febriyanti, Ayu. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. Jurnal Akuntansi. Universitas Brawijaya. Malang
- Florida, Asha. 2006. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Hamdi S Asep, Baharudin E. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Indriyantoro N., Supomo B.. 2009. *Metodologi Penelitian: untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.

- Indriyani P, Erli. 2015. *Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- Nabila, Astriana M. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nogi S. Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta
- Nordiawan Deddi, Sondi Iswahyudi, dan Rahmawati Maulidah. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Nugraini, Esthy. 2012. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Pramono, Joko. 2012. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi. STIE AMA Salatiga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pratama, Nur. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Skripsi. Program Sarjana Alih Jenis

Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Suharjdanto, Joko dan Yuliningtyas, Rukmita R. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi. Universitas Sebelas Maret.

Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi Surakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan*

Wenny, Cherrya. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Akuntansi. STIE MDP

Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers. Jakarta.

<http://bappeda.situbondokab.go.id/>

<http://situbondokab.go.id/>

Lampiran 1 :

Hasil wawancara

Nama : Yoni Fitra Yulianto, S.E

Jabatan : Kepala Seksi Akuntansi Pelaporan DPPKAD Kabupaten Situbondo

Peneliti : Hasil perhitungan dari rasio kemandirian, kabupaten Situbondo masih terbilang instruktif. Dimana sumber pendapatannya masih bergantung pada pemerintah pusat. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan PAD?

Narasumber : Maaf mbak, kalau menjelaskan tentang bagaimana PAD di Kabupaten Situbondo ke saya kurang tepat. Karena saya takut salah untuk menjelaskan lebih dalam. Kalau untuk penjelasan tentang bagaimana keuangan daerah berdasarkan Calk saya masih bisa menjelaskan. Namun untuk penggambaran PAD di Situbondo saya masih kurang bisa menjelaskan.

Peneliti : Lalu bagaimana kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Situbondo berdasarkan Calk terkait dengan PAD?

Narasumber : Baik saya akan menjelaskan keuangan daerah terkait dengan PAD. Penjelasan saya ini mengacu pada Calk pada tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga dengan adanya pertauran tersebut, maka pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki beberapa kebijakan, *pertama*, untuk melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan cara melalui optimalisasi pelayanan, intensifikasi pajak daerah yang proporsional, retribusi daerah dan perbaikan pada bagian laba perusahaan daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan keuntungan bagi pembangunan. *Kedua*, Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. *Ketiga*, Melakukan promosi

usaha dan temu usaha atas produk-produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Situbondo. *Keempat*, Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.

Untuk usaha pemerintah mencapai target pendapatan daerah antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah, dengan program dan kegiatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar Dinas dilingkungan Kabupaten Situbondo dan dengan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, profesional, serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Peneliti : Untuk rasio selanjutnya juga masih seputar tentang PAD. Sehingga saya langsung saja pada rasio keserasian yaitu bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Situbondo memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Sehingga jika belanja rutin lebih besar dari pada belanja pembangunan. Maka daerah tersebut dalam menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Sedangkan untuk hasil rasio keserasian di Kabupaten Situbondo belanja rutin masih lebih besar dari belanja pemabngaan. Apa saja yang menjadi faktor belanja rutin tersebut lebih besar dari belanja pembangunan?

Narasumber : Sama dengan penjelasan yang dapat saya sampaikan sebelumnya tentang PAD. Saya juga kurang dapat menjelaskan bagaiman belanja daerah di kabupaten Situbondo. Saya hanya dapat menjelaskannya lewat Calk ini. Menurut penjelasan dari Calk ini.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk Tahun 2015 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2014 berpedoman pada RPJMD 2011-2015 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam Tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Agar penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dapat tercapai, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2015 diarahkan pada :

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akurat.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah Tahun 2015 termasuk alokasi anggaran dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).
4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan menjadi 10 persen sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD serta program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo (Committed Budget).

6. Sesuai dengan amanat UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
7. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati Situbondo Tahun 2015 maka dialokasikan dana cadangan dari APBD Tahun 2014.
8. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan, diperlukan dana bantuan kepada masyarakat yang terdiri dari bantuan keuangan, bantuan hibah, dan bantuan sosial.
9. Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
11. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
12. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil dari Provinsi dengan pola :
 - a. Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara proporsional guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
 - b. Alokasi yang bersifat specific grant dari pos bantuan keuangan dari Provinsi diarahkan dalam rangka mendukung agenda akselerasi pencapaian Visi Kabupaten Situbondo 2011-2015.

Nama : Drs. Siswanto
Jabatan : Sub. Bid. Pengumpulan data, penelitian dan analisa data Bapedda
Kabupaten Situbondo

Peneliti : PAD ada peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2014, namun dana perimbangan lebih besar. Apa yang perlu dilakukan untuk upaya peningkatan PAD?

Narasumber : potensi daerah yang perlu dikembangkan. Bapedda juga mendorong ada nya riset untuk mengukur potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD. Setelah dilakukan riset tentang potensi daerah. Ternyata antara perencanaan dan tindak lanjutnya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga PAD belum maksimal dalam peningkatannya. Sehingga dana perimbangan yang berperan besar malah.

Peneliti : Tidak sesuai dengan harapannya itu dipengaruhi oleh faktor apa saja?

Narasumber : ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Kalau dari internal sudah ada sistem untuk mewujudkan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD. Namun masih saja ada aparat yang belum bisa melaksanakan sistem yang mungkin kewajibannya dengan baik. Selain itu SKPD tidak memiliki terobosan baru untuk upaya peningkatan PAD. Untuk faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Pernah ada investor yang ingin membantu masyarakat misalnya seperti dibidang perikanan atau peternakan yang menawarkan teknologi dan cara baru dalam melaksanakan usahanya. Namun sebelum adanya sosialisasi masyarakat malah tidak mau ada orang baru dilingkungannya. Mereka menganggap bahwa orang baru seperti investor tersebut malah berniat tidak baik. Sehingga dengan keadaan masyarakat yang memiliki pemikiran buruk dan dianggap tidak kondusif lah yang menghambat investor masuk. Dan juga kebiasaan masyarakat yang tidak mau maju. Seperti halnya gaya hidup mereka yang terkesan malas. Padahal jika semua sektor yang berpotensi dapat menaikkan PAD dapat dikembangkan dengan cara kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat maka selain meningkatkan PAD juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Peneliti : Dalam upaya peningkatan PAD maka akan ada hambatan yang ditemui oleh pemerintah. Apakah ada evaluasi?

Narasumber : sebelum dilakukan rapat koordinasi terkait APBD untuk tahun selanjutnya biasanya dilakukan evaluasi. Namun tiap SKPD yang diperintahkan untuk menggali potensi itu kurang memenuhi harapan. Selain itu juga SKPD memasang target yang aman. Misalnya sepuluh juta juta. Padahal sepuluh juta itu bisa dikatakan itu minimal angka yang dapat diraih. PAD di situbondo itu selalu

naik namun bukan dari potensi. Kalau mau liat PAD sebenarnya kan liat dari potensinya. Sehingga target yang ditetapkan masih jauh dengan yang diharapkan. Yang saya tahu untuk memasang target PAD sebelumnya mengadakan riset potensi dan mengukur potensi yang ada. Misalnya yang bisa didapat daerah jika ditambah dengan potensi daerah itu sebesar seratus juta. Maka SKPD tidak memasang target 100%. Sehingga SKPD memasang target yang aman yang pasti akan didapat daerah. Sehingga pemerintah daerah terus saja bergantung dengan dana perimbangan. Karena perbandingan antara PAD dengan dana perimbangan masih 5% hingga 7%. Itu disebabkan adanya memasang target yang jauh dari ukuran potensi daerah. Untuk pemasangan target PAD dan belanja daerah semua SKPD melakukan rapat dengan DPPKAD. Namun DPPKAD tidak melakukan penekanan untuk target yang akan dicapai. Kami sudah menegur dalam evaluasi seharusnya bisa menghasilkan segini (lebih besar). Sehingga SKPD bekerja seadanya. Bagaimana cara menaikkan pendapatan kalau kerjanya seperti itu.

Peneliti : Apakah pemerintah tidak menanyakan kenapa targetnya sebesar itu, sedangkan sebenarnya bisa lebih dari itu?

Narasumber : dengan Dinas Pendapatan sudah mempertanyakan itu dan merapatkan hal yang menyangkut pendapatan namun apa yang ada dilapangan malah SKPD masih memasang target sebesar itu. Dinas pendapatan juga sudah menghimbau kalau disini ada rencana daerah untuk menaikkan PAD namun kenyataannya SKPD masih memasang target minimal tanpa memperhitungkan potensi yang ada.

Peneliti : Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak bahwa situbondo masih banyak potensi yang harus digali tidak hanya aspek potensi alam saja. Sehingga jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerja maksimal sesungguhnya situbondo juga dapat menjadi daerah yang mandiri. Bagaimana tanggapan bapak?

Narasumber : iya sebenarnya bisa mbak. namun semua tergantung faktor internal sama eksternalnya yang harus diperbaiki.

Peneliti : Dalam belanja pembangunan di setiap SKPD itu seperti apa pak?

Narasumber : pertama ditentukan dulu target pendapatannya nanti di plotting rencana SKPD untuk pembangunan seperti apa. Dari SKPD dilaporkan ke Bappeda lalu kita himpun. Lalu disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang nantinya dimasukkan kepada rencana anggaran yang nantinya dievaluasi dengan pemerintah. Perencanaan untuk belanja pembangunan juga tidak hanya kepada rencana yang telah dibuat namun terkadang rencana tersebut terkait dengan perbaikan pelaksanaan rencana yang terdahulu. Kemarin apa yang belum dicapai dan mencari solusinya.

Peneliti : Apakah setiap SKPD membuat perencanaannya sendiri apakah ditentukan dengan pemerintah daerah?

Narasumber : biasanya nanti ada rapat koordinasi dimana semua SKPD hadir disitu. Nanti akan membicarakan rapat pembangunan selama setahun kedepan.

Peneliti :Jika dilihat dari perbandingan antara belanja rutin dengan belanja modal masih lebih besar belanja rutin. Namun disitu selama tahun 2010 hingga 2014 belanja rutin mulai menurun dan belanja pembangunan naik. Bagaimana bisa seperti itu pak?

Narasumber : jadi sebenarnya setiap tahun pendapatan daerah itu naik. Dimana juga gaji/upah pegawai juga naik, namun tidak signifikan kenaikan pendapatan daerah. Maka daerah bisa melakukan efisiensi sehingga uang dari sisa atau lebih dari belanja rutin dialokasikan kepada belanja pembangunan. Itu adalah salah satu upaya daerah untuk meningkatkan belanja modal.

Peneliti : Selain itu dengan perbandingan belanja rutin yang besar jumlahnya dibandingkan belanja modal biasanya hal tersebut menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat seperti pemerintah dianggap boros. Nah bagaimana bapak menanggapi hal tersebut padahal belanja rutin pun penting?

Narasumber : iya belanja rutin memang penting disini mbak. Kembali lagi ini ada kaitannya dengan peningkatan PAD. Kita sudah tahu faktor eksternal dan internalnya. Kita sadar bahwa kedua faktor tersebut harus dapat diatasi. Jika pendapatannya bisa naik secara signifikan sesuai dengan potensi yang ada, kemungkinan belanja modal di situbondo dapat dinaikkan. Karena kedua faktor tersebutlah yang memiliki peran penting dalam melaksanakan upaya kenaikan pad. Dimana kenaikan pad tersebut biasanya berubungan dengan adanya perbaikan dan pembangunan potensi daerah yang nantinya juga penghasilannya juga akan kembali ke daerah.

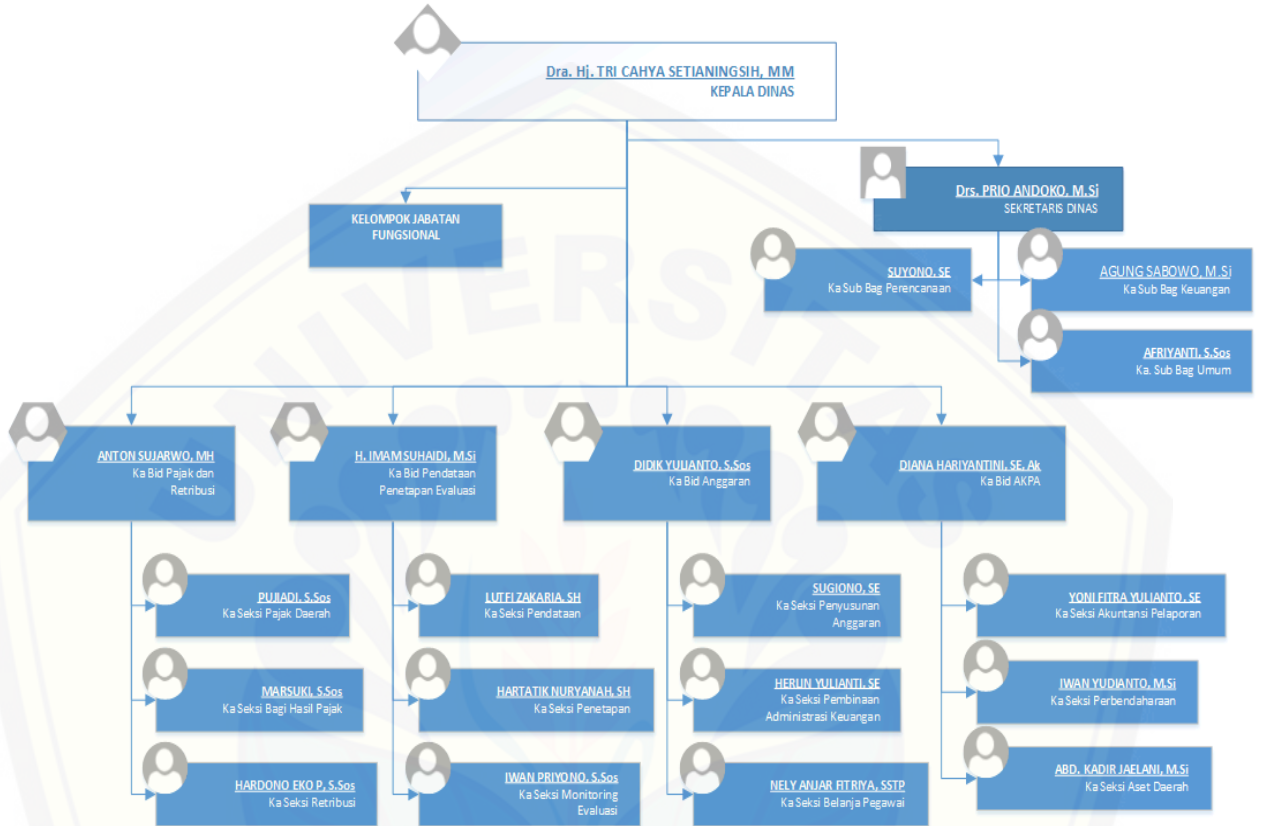
Peneliti : Pemerintah daerah situbondo menginginkan daerahnya itu seperti apa sih pak kedepannya?

Narasumber : ya dari kami sendiri ingin kondisi masyarakat yang kondusif lah untuk menggaet investor terutama investor yang memang ingin bekerja sama untuk mengembangkan potensi daerah. Dan juga aparat yang ada di SKPD juga diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengukuran potensi sehingga apa yang ingin diwujudkan daerah akan dapat tercapai.

Lampiran 2 :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO



Lampiran 3 :

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	(%)	REALISASI 2009
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009					
1	PENDAPATAN	674.388.428.190,37	680.876.876.035,78	100,96	610.725.953.118,34
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.033.091.813,37	46.579.946.273,78	108,24	33.913.027.881,34
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.252.787.060,00	9.246.964.308,00	112,05	8.036.364.768,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.707.458.355,50	8.221.138.726,75	106,66	12.673.280.619,75
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.553.034.143,05	3.562.491.663,82	139,54	2.723.971.178,19
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.519.812.254,82	25.549.351.575,21	104,20	10.479.411.315,40
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	605.078.876.377,00	608.076.571.861,00	100,50	574.317.190.237,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	535.082.983.448,00	535.931.914.989,00	100,16	533.935.868.350,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	35.875.962.923,00	35.522.939.461,00	99,02	31.889.176.051,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	11.630.202.525,00	12.832.157.528,00	110,33	7.811.212.299,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	447.609.618.000,00	447.609.618.000,00	100,00	433.443.480.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	39.967.200.000,00	39.967.200.000,00	100,00	60.792.000.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	39.561.894.160,00	37.315.924.800,00	94,32	11.525.100.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	39.561.894.160,00	37.315.924.800,00	94,32	11.525.100.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	30.433.998.769,00	34.828.732.072,00	114,44	28.856.221.887,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.433.998.769,00	34.828.732.072,00	114,44	28.821.396.557,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.825.330,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	26.276.460.000,00	26.220.357.901,00	99,79	2.495.735.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	138.100.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	26.276.460.000,00	26.220.357.901,00	99,79	2.357.635.000,00
2	BELANJA	754.956.617.566,24	689.729.076.683,91	91,36	628.721.153.925,20
2.1	BELANJA OPERASI	649.610.486.757,45	603.307.935.156,64	92,87	505.151.841.204,20
2.1.1	Belanja Pegawai	473.474.615.626,45	445.023.781.738,00	93,99	356.981.677.858,00
2.1.2	Belanja Barang	97.398.466.939,00	85.816.329.434,36	88,11	66.761.187.532,00
2.1.3	Belanja Bunga	15.000.000,00	12.170.530,28	81,14	15.916.098,20
2.1.5	Belanja Hibah	44.369.971.515,00	40.800.934.077,00	91,96	44.328.940.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.586.392.677,00	12.380.751.977,00	84,88	16.009.848.916,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	19.766.040.000,00	19.273.967.400,00	97,51	21.054.270.800,00
2.2	BELANJA MODAL	99.384.727.995,80	85.925.600.152,87	86,46	122.877.793.721,00
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	247.532.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	29.427.130.605,80	24.222.163.185,00	82,31	36.665.519.011,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
					Halaman 1 dari 2



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2011 DAN 2010

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	(%)	REALISASI 2010
1	PENDAPATAN	839.956.093.481,99	855.715.430.310,85	101,88	680.876.876.035,78
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.045.739.663,99	61.761.290.501,85	116,43	46.579.946.273,78
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.277.230.066,00	11.111.182.280,03	119,77	9.246.964.308,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.181.821.155,00	9.211.617.798,00	112,59	8.221.138.726,75
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.045.253.033,62	5.018.136.616,46	99,46	3.562.491.663,82
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.541.435.409,37	36.420.353.807,36	119,25	25.549.351.575,21
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	756.785.478.818,00	762.533.004.309,00	100,76	608.076.571.861,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	626.322.133.798,00	628.556.224.835,00	100,36	535.931.914.989,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	34.249.979.962,00	33.711.165.357,00	98,43	35.522.939.461,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	15.074.071.836,00	18.150.632.478,00	120,41	12.832.157.528,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	516.044.782.000,00	515.752.127.000,00	99,94	447.609.618.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	60.953.300.000,00	60.942.300.000,00	99,98	39.967.200.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	94.954.625.560,00	94.979.109.148,00	100,03	37.315.924.800,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	94.954.625.560,00	94.979.109.148,00	100,03	37.315.924.800,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	35.508.719.460,00	38.997.670.326,00	109,83	34.828.732.072,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.508.719.460,00	38.997.670.326,00	109,83	34.828.732.072,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	30.124.875.000,00	31.421.135.500,00	104,30	26.220.357.901,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	30.124.875.000,00	31.421.135.500,00	104,30	26.220.357.901,00
2	BELANJA	905.069.747.981,57	838.589.264.436,03	92,65	689.729.076.683,91
2.1	BELANJA OPERASI	747.196.518.207,88	717.135.950.082,03	95,98	603.307.935.156,64
2.1.1	Belanja Pegawai	524.544.051.696,38	508.502.647.129,58	96,94	445.023.781.738,00
2.1.2	Belanja Barang	153.584.090.584,50	141.025.346.413,11	91,82	85.816.329.434,36
2.1.3	Belanja Bunga	15.000.000,00	8.424.962,34	56,17	12.170.530,28
2.1.5	Belanja Hibah	28.302.825.250,00	28.124.734.500,00	99,37	40.800.934.077,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.484.308.000,00	15.611.404.400,00	94,70	12.380.751.977,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	24.266.242.677,00	23.863.392.677,00	98,34	19.273.967.400,00
2.2	BELANJA MODAL	153.893.843.294,92	120.719.312.264,00	78,44	85.925.600.152,87
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	37.425.266.836,00	30.499.726.255,00	81,50	24.222.163.185,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	54.185.531.171,92	31.185.690.594,00	57,55	14.748.751.356,64
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.491.493.987,00	58.655.289.615,00	96,96	41.179.133.886,23
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.791.551.300,00	378.605.800,00	21,13	5.775.551.725,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	(%)	REALISASI 2010
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.979.386.478,77	734.002.090,00	18,45	495.541.374,40
2.3.1	Belanja Tak Terduga	3.979.386.478,77	734.002.090,00	18,45	495.541.374,40
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.113.654.499,58)	17.126.165.874,82	(26,30)	(8.852.200.648,13)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	113.777.010.664,58	113.719.743.397,58	99,95	125.223.172.540,87
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	112.557.531.392,58	112.557.531.392,58	100,00	111.960.395.540,87
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.219.479.272,00	1.162.212.005,00	95,30	1.262.777.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.035.000.000,00	5.031.440.500,18	99,93	3.813.440.500,16
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	782.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	35.000.000,00	31.440.500,18	89,83	31.440.500,16
	PEMBIAYAAN NETTO	108.742.010.664,58	108.688.302.897,40	99,95	121.409.732.040,71
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	43.628.356.165,00	125.814.468.772,22	288,38	112.557.531.392,58

SITUBONDO, 1 Januari 2011
BUPATI

H DADANG WIGIARTO, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2012 DAN 2011

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	(%)	REALISASI 2011
1	PENDAPATAN	969.006.907.761,40	979.961.442.413,22	101,13	855.715.430.310,85
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.590.209.445,40	67.050.480.515,22	110,66	61.761.290.501,85
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.626.379.856,86	14.128.755.468,60	121,52	11.111.182.280,03
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.012.393.660,00	11.787.252.518,00	84,12	9.211.617.798,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.085.253.033,16	4.236.714.534,97	83,31	5.018.136.616,46
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.866.182.895,38	36.897.757.993,65	123,54	36.420.353.807,36
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	862.340.633.316,00	869.976.093.398,00	100,89	762.533.004.309,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	737.590.309.500,00	747.658.559.314,00	101,37	628.556.224.835,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	38.252.284.538,00	37.192.223.368,00	97,23	33.711.165.357,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	16.525.894.962,00	27.654.205.946,00	167,34	18.150.632.478,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	616.093.730.000,00	616.093.730.000,00	100,00	515.752.127.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	66.718.400.000,00	66.718.400.000,00	100,00	60.942.300.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	85.557.770.000,00	85.557.770.000,00	100,00	94.979.109.148,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	85.557.770.000,00	85.557.770.000,00	100,00	94.979.109.148,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	39.192.553.816,00	36.759.764.084,00	93,79	38.997.670.326,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39.192.553.816,00	36.759.764.084,00	93,79	38.997.670.326,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	46.076.065.000,00	42.934.868.500,00	93,18	31.421.135.500,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	46.076.065.000,00	42.934.868.500,00	93,18	31.421.135.500,00
2	BELANJA	1.043.487.899.640,62	927.268.554.210,69	88,86	838.589.264.436,03
2.1	BELANJA OPERASI	820.734.952.271,83	771.244.511.796,14	93,97	717.135.950.082,03
2.1.1	Belanja Pegawai	590.127.810.082,99	564.215.933.004,54	95,61	508.502.647.129,58
2.1.2	Belanja Barang	153.072.793.761,84	134.639.375.363,69	87,96	141.025.346.413,11
2.1.3	Belanja Bunga	45.000.000,00	3.145.250,91	6,99	8.424.962,34
2.1.5	Belanja Hibah	36.126.265.750,00	31.852.214.500,00	88,17	28.124.734.500,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.792.840.000,00	5.742.840.000,00	99,14	15.611.404.400,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	35.570.242.677,00	34.791.003.677,00	97,81	23.863.392.677,00
2.2	BELANJA MODAL	218.704.437.372,63	155.800.530.132,00	71,24	120.719.312.264,00
2.2.1	Belanja Tanah	300.000.000,00	265.347.000,00	88,45	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	37.402.745.602,09	32.234.718.168,00	86,18	30.499.726.255,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	112.485.266.096,00	58.706.798.845,00	52,19	31.185.690.594,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.208.764.674,54	62.847.567.090,00	94,92	58.655.289.615,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.307.661.000,00	1.746.099.029,00	75,67	378.605.800,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2012	REALISASI 2012	(%)	REALISASI 2011
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	4.048.509.996,16	223.512.282,55	5,52	734.002.090,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	4.048.509.996,16	223.512.282,55	5,52	734.002.090,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.480.991.879,22)	52.692.888.202,53	(70,75)	17.126.165.874,82
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	127.034.348.044,22	83.488.630.231,83	65,72	113.719.743.397,58
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	125.814.868.772,22	82.182.072.081,83	65,32	112.557.531.392,58
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.219.479.272,00	1.306.558.150,00	107,14	1.162.212.005,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	8.925.000.000,00	8.536.032.750,26	95,64	5.031.440.500,18
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.750.000.000,00	3.400.000.000,00	90,67	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	175.000.000,00	136.032.750,26	77,73	31.440.500,18
	PEMBIAYAAN NETTO	118.109.348.044,22	74.952.597.481,57	63,46	108.688.302.897,40
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	43.628.356.165,00	127.645.485.684,10	292,57	125.814.468.772,22

SITUBONDO, 31 Desember 2012

BUPATI SITUBONDO

H. DADANG WIGIARTO,SH



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
1	PENDAPATAN	1.099.104.931.257,42	1.109.471.305.726,91	100,94	979.961.442.413,22
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.190.222.487,42	78.043.407.931,91	106,63	67.050.480.515,22
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.286.333.949,70	17.188.209.719,65	120,31	14.128.755.468,60
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.413.677.356,00	16.014.432.520,00	91,96	11.787.252.518,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.205.126.325,82	4.292.216.221,02	102,07	4.236.714.534,97
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.285.084.855,90	40.548.549.471,24	108,75	36.897.757.993,65
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.008.641.034.270,00	1.014.348.555.495,00	100,57	869.976.093.398,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	832.012.208.984,00	839.722.211.740,00	100,93	747.658.559.314,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	33.789.616.483,00	35.796.455.530,00	105,94	37.192.223.368,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	24.246.276.501,00	29.949.440.210,00	123,52	27.654.205.946,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	692.549.026.000,00	692.549.026.000,00	100,00	616.093.730.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	81.427.290.000,00	81.427.290.000,00	100,00	66.718.400.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	128.507.817.056,00	129.940.985.000,00	101,12	85.557.770.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	128.507.817.056,00	129.940.985.000,00	101,12	85.557.770.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	48.121.008.230,00	44.685.358.755,00	92,86	36.759.764.084,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.121.008.230,00	44.685.358.755,00	92,86	36.759.764.084,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.273.674.500,00	17.079.342.300,00	98,87	42.934.868.500,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	556.169.500,00	361.837.300,00	65,06	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	16.717.505.000,00	16.717.505.000,00	100,00	42.934.868.500,00
2	BELANJA	1.222.569.896.213,52	1.150.103.067.652,69	94,07	927.268.554.210,69
2.1	BELANJA OPERASI	943.001.578.698,67	884.471.142.333,85	93,79	771.244.511.796,14
2.1.1	Belanja Pegawai	654.662.407.345,67	619.282.087.404,00	94,60	564.215.933.004,54
2.1.2	Belanja Barang	202.742.554.276,00	183.801.741.012,85	90,66	134.639.375.363,69
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.145.250,91
2.1.5	Belanja Hibah	38.559.524.400,00	37.477.962.940,00	97,20	31.852.214.500,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.048.900.000,00	8.488.500.000,00	93,81	5.742.840.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	37.988.192.677,00	35.420.850.977,00	93,24	34.791.003.677,00
2.2	BELANJA MODAL	277.568.317.514,85	264.570.994.896,27	95,32	155.800.530.132,00
2.2.1	Belanja Tanah	1.125.000.000,00	99.900.000,00	8,88	265.347.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.198.706.726,00	39.370.621.138,00	89,08	32.234.718.168,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	127.475.677.588,85	123.961.299.433,00	97,24	58.706.798.845,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.851.308.000,00	98.603.997.125,27	96,81	62.847.567.090,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.917.625.200,00	2.535.177.200,00	86,89	1.746.099.029,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.060.930.422,57	53,05	223.512.282,55
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.060.930.422,57	53,05	223.512.282,55
	SURPLUS / (DEFISIT)	(123.464.964.956,10)	(40.631.761.925,78)	32,91	52.692.888.202,53
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	128.864.964.956,10	128.588.888.140,10	99,79	83.488.630.231,83
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	127.645.485.684,10	127.645.485.684,10	100,00	82.182.072.081,83
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	1.306.558.150,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.219.479.272,00	943.402.456,00	77,36	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100,00	8.536.032.750,26
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	3.400.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	136.032.750,26
	PEMBIAYAAN NETTO	123.464.964.956,10	123.188.888.140,10	99,78	74.952.597.481,57
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	82.557.126.214,32	0,00	127.645.485.684,10

SITUBONDO, 31 Desember 2013

BUPATI SITUBONDO

H. DADANG WIGIARTO,SH



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
AUDITED BPK RI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2014	Reff	REALISASI 2014	(%)	REALISASI 2013
1	PENDAPATAN	1.343.756.185.515,07		1.359.193.724.048,62	101,15	1.109.471.305.726,91
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	115.603.036.102,25	4.g.2.a).(1)	129.640.577.933,62	112,14	78.043.407.931,91
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	19.894.854.000,00	4.g.2.a).(1).(a)	24.287.378.394,47	122,08	17.188.209.719,65
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.474.501.790,00	4.g.2.a).(1).(b)	15.183.322.856,00	57,35	16.014.432.520,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.092.921.603,99	4.g.2.a).(1).(c)	4.092.920.658,98	100,00	4.292.216.221,02
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.140.758.708,26	4.g.2.a).(1).(d)	86.076.956.024,17	132,14	40.548.549.471,24
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.154.316.987.412,82	4.g.2.a).(2)	1.156.284.408.115,00	100,17	1.014.348.555.495,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	931.313.965.434,00	4.g.2.a).(2).(a)	930.133.128.794,00	99,87	839.722.211.740,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	26.139.527.866,00		27.546.242.322,00	105,38	35.796.455.530,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	46.559.398.568,00		43.971.847.472,00	94,44	29.949.440.210,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	766.542.999.000,00		766.542.999.000,00	100,00	692.549.026.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	92.072.040.000,00		92.072.040.000,00	100,00	81.427.290.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	150.779.050.000,00	4.g.2.a).(2).(b)	150.779.050.000,00	100,00	129.940.985.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	150.779.050.000,00		150.779.050.000,00	100,00	129.940.985.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	72.223.971.978,82	4.g.2.a).(2).(c)	75.372.229.321,00	104,36	44.685.358.755,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.223.971.978,82		75.372.229.321,00	104,36	44.685.358.755,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	73.836.162.000,00	4.g.2.a).(3)	73.268.738.000,00	99,23	17.079.342.300,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	832.912.000,00		265.488.000,00	31,87	361.837.300,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	73.003.250.000,00		73.003.250.000,00	100,00	16.717.505.000,00
2	BELANJA	1.419.118.441.083,88		1.305.647.017.406,14	92,00	1.150.103.067.652,69
2.1	BELANJA OPERASI	1.066.771.299.623,08	4.g.2.b).(1)	978.829.190.783,14	91,76	884.471.142.333,85
2.1.1	Belanja Pegawai	728.620.886.427,73	4.g.2.b).(1).(a)	682.568.345.810,42	93,68	619.282.087.404,00
2.1.2	Belanja Barang	271.764.358.445,35	4.g.2.b).(1).(b)	234.704.576.636,72	86,36	183.801.741.012,85
2.1.5	Belanja Hibah	20.679.795.000,00	4.g.2.b).(1).(c)	19.254.915.000,00	93,11	37.477.962.940,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.270.700.000,00	4.g.2.b).(1).(d)	5.257.780.000,00	83,85	8.488.500.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	39.435.559.750,00	4.g.2.b).(1).(e)	37.043.573.336,00	93,93	35.420.850.977,00
2.2	BELANJA MODAL	346.523.782.736,49	4.g.2.b).(2)	325.053.037.623,00	93,80	264.570.994.896,27
2.2.1	Belanja Tanah	4.675.000.000,00	4.g.2.b).(2).(a)	3.476.287.000,00	74,36	99.900.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	57.234.941.508,54	4.g.2.b).(2).(b)	51.148.390.371,00	89,37	39.370.621.138,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	94.194.731.949,95	4.g.2.b).(2).(c)	88.164.033.251,00	93,60	123.961.299.433,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	187.571.341.673,00	4.g.2.b).(2).(d)	180.377.130.205,00	96,16	98.603.997.125,27
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.847.767.605,00	4.g.2.b).(2).(e)	1.887.196.796,00	66,27	2.535.177.200,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2014	Ref	REALISASI 2014	(%)	REALISASI 2013
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.823.358.724,31	4.g.2.b).(3)	1.764.789.000,00	30,31	1.060.930.422,57
2.3.1	Belanja Tak Terduga	5.823.358.724,31		1.764.789.000,00	30,31	1.060.930.422,57
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.362.255.568,81)		53.546.706.642,48	(71,05)	(40.631.761.925,78)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH	82.762.793.769,32	4.g.2.c).(1)	82.818.930.324,32	100,07	128.588.888.140,10
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	82.557.126.214,32		82.557.126.214,32	100,00	127.645.485.684,10
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	205.667.555,00		261.804.110,00	127,29	943.402.456,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	7.400.538.200,51	4.g.2.c).(2)	7.409.125.338,82	100,12	5.400.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.333.829.990,16		6.342.417.128,47	100,14	5.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	900.000.000,00		900.000.000,00	100,00	400.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	166.708.210,35		166.708.210,35	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	75.362.255.568,81		75.409.804.985,50	100,06	123.188.888.140,10
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	4.g.2.d)	128.956.511.627,98	0,00	82.557.126.214,32
SITUBONDO, 31 DESEMBER 2014						
BUPATI SITUBONDO						
H. DADANG WIGIARTO,SH						